



INTISARI

Sebagian besar pengembangan kawasan pariwisata berpotensi menyebabkan tekanan ekologis terhadap KKP Nusa Penida. Persepsi dan partisipasi dalam kegiatan pengelolaan KKP Nusa Penida menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak pertama yang merasakan dampak dari adanya aktivitas pariwisata dan didukung dengan valuasi ekonomi pariwisata di kawasan tersebut. Peran pemerintah juga penting dalam penerapan kebijakan yang tepat dalam mendukung perkembangan pariwisata di KKP Nusa Penida. Penelitian ini menggunakan metode survei berupa kuesioner pada 80 masyarakat di Desa Jungutbatu dan 50 wisatawan yang berkunjung ke KKP Nusa Penida, serta wawancara terhadap Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali, dan tokoh adat.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat di KKP Nusa Penida berada pada kategori cukup baik dengan persentase secara berturut-turut 57,7% dan 56,4%. Nilai persepsi dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh karakteristik demografi seperti usia dan pendidikan masyarakat. Nilai total manfaat langsung di KKP Nusa Penida senilai Rp. 32.685.835.864 dengan nilai ekonomi wisata KKP Nusa Penida Rp. 155.784.219.756/ tahun. Tingginya nilai manfaat sektor wisata bahari menunjukkan bahwa keberadaan lingkungan bahari di KKP Nusa Penida menjadi penting dalam keberlangsungan pariwisata KKP Nusa Penida

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Klungkung sudah berperan dalam pengelolaan pariwisata di KKP Nusa Penida. Salah satunya adalah dengan pembangunan transportasi laut berupa dermaga di tiga pelabuhan untuk memudahkan akses dan pemerataan wisata di KKP Nusa Penida, Pemerintah Desa Jungutbatu juga turut mengelola lingkungan di KKP Nusa Penida melalui pembersihan dan pelepasan bibit-bibit perikanan. Namun, dari Lembaga Adat di Desa Jungutbatu masih belum memiliki peraturan atau *awig-awig* yang dapat digunakan dalam mengelola kawasan lingkungan di daerahnya. Strategi dan rekomendasi kebijakan yang dalam pengelolaan aktivitas pariwisata di KKP Nusa Penida melalui pengelolaan secara terpadu. Pembentukan sistem atau lembaga melalui Jejaring KKP yang mampu mengkoordinasikan kegiatan sehingga tidak adanya tumpang tindih dalam pengelolaan KKP Nusa Penida.

Kata Kunci: Persepsi dan Partisipasi, Valuasi Ekonomi, KKP Nusa Penida, Strategi Pengelolaan Lingkungan



ABSTRACT

Most of the development of tourism areas has the potential to cause ecological pressure on the Nusa Penida MPA. Perception and participation in the management activities of the Nusa Penida MPA is important because the community is the first to feel the impact of tourism activities and is supported by an economic valuation of tourism in the area. The government's role is also important in implementing appropriate policies to support tourism development in the Nusa Penida MPA. This study used a survey method in the form of a questionnaire on 80 people in Jungutbatu Village and 50 tourists who visited the Nusa Penida MPA, as well as interviews with the Village Government, Regional Government, UPTD Bali Marine Protected Areas, and traditional leaders.

The results showed that the level of public perception and participation in the Nusa Penida MPA was in the sufficient category with percentages of 57.7% and 56.4%, respectively. Perceived and community values are strongly influenced by demographic characteristics such as age and community education. The total value of direct benefits at the Nusa Penida MPA is Rp. 32,685,835,864 with an economic value for the Nusa Penida MPA tourism of Rp. 155,784,219,756/ year. The high value of the benefits of the marine tourism sector shows that the existence of the marine environment in the Nusa Penida MPA is important in the sustainability of the Nusa Penida MPA tourism.

So far, the Provincial Government of Bali and the Regional Government of Klungkung have played a role in tourism management at the Nusa Penida MPA. One of them is the construction of sea transportation in the form of docks at three ports to facilitate access and equal distribution of tourism at the Nusa Penida MPA. The Jungutbatu Village Government also participates in managing the environment at the Nusa Penida MPA through cleaning and releasing fishery seeds. However, the Jungutbatu Village Traditional Institution does not yet have regulations or awig-awig that can be used in managing environmental areas in their area. Strategies and policy recommendations in the management of tourism activities in the Nusa Penida MPA through integrated management. Formation of a system or institution through the KKP Network that is able to coordinate activities so that there is no overlapping in their management, and the application of the blue economy to the Nusa Penida MPA.

Keywords: Perception and Participation, Economic Valuation, Nusa Penida Marine Protected Areas, Environmental Management Strategy